

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Aburaera, Sukarno. (2017). *Filsafat Hukum: Teori dan Praktik*. Jakarta: Kencana (Prenada Media Group).
- Ali, Achmad. (2017). *Menguak Teori Hukum dan Teori Peradilan*. Jakarta: Kencana.
- Anggara, Sahya. (2018). *Hukum Administrasi Negara*. Bandung: Pustaka Setia.
- Apter, David E. (1987). *Pengantar Analisis Politik*. Jakarta: Rajawali.
- Basri, Faisal, & Haris Munandar. (2022). *Lanskap Ekonomi Indonesia*. Jakarta: Erlangga.
- Fitriani. (2019). *Hukum Pajak dan Retribusi Daerah*. Purbalingga: Eureka Media Aksara.
- Hadjon, Philipus M. (2011). *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Hardiyansyah. (2018). *Kualitas Pelayanan Publik*. Yogyakarta: Gava Media.
- Huda, Ni'matul. (2017). *Teori dan Hukum Konstitusi*. Bandung: Nusa Media.
- Huda, Ni'matul. (2022). *Teori Perundang-Undangan*. Yogyakarta: FH UII Press.
- Isradi, Muhammad, Amar Mufhidin, & Andri Irfan Rifai. (2020). *Rekayasa Lalu Lintas: Teori dan Aplikasi*. Yogyakarta: Deepublish.
- Khaerudin, Suhadi, & Ruknan. (2019). *Bunga Rampai Tata Kelola Keuangan Daerah*. Yogyakarta: Deepublish.
- Lubis, M. Solly. (2018). *Landasan dan Teknik Perundang-Undangan*. Bandung: Mandar Maju.
- Marbun, S.F. (2015). *Peradilan Administrasi Negara Dan Upaya Administrasi Di Indonesia (Edisi Terbaru)*. Yogyakarta: FH UII Press.
- Marzuki, Peter Mahmud. (2021). *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Kencana.
- Mulyadi. (2019). *Sistem Akuntansi (Edisi 4)*. Jakarta: Salemba Empat.
- Nasrun, Panitia. (2010). *Asas-Asas Hukum Keuangan Daerah*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Putranto, Leksmono Suryo. (2016). *Rekayasa Lalu Lintas (Edisi 3)*. Jakarta: Indeks.
- Ridwan, HR. (2016). *Hukum Administrasi Negara (Edisi Revisi)*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.

- Sayre, Wallace S. (1988). *Ilmu Pemerintahan dan Administrasi Negara*. Jakarta: Aksara Baru.
- Siahaan, Marihot Pahala. (2019). *Hukum Pajak Elementer*. Jakarta: Graha Ilmu.
- Simanjuntak, Timbul Hamonangan. (2021). *Manajemen Pajak dan Retribusi Daerah*. Yogyakarta: Andi Offset.
- Simatupang, Dian Puji. (2022). *Hukum Keuangan Negara dan Daerah*. Depok: Rajawali Pers.
- Soekanto, Soerjono. (2015). *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI-Press.
- Suratman & Philips Dillah. (2012). *Metode Penelitian Hukum*. Bandung: Alfabeta.
- Sutedi, Adrian. (2023). *Hukum Pajak*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Syafiie, Inu Kencana & Ni'matul Huda. (2019). *Hukum Pemerintahan Daerah*. Bandung: Nusa Media.
- Tamin, Ofyar Z. (2020). *Perencanaan dan Pemodelan Transportasi*. Bandung: ITB.
- Tandelilin, Eduardus. (2020). *Pasar Modal: Manajemen Portofolio dan Investasi*. Yogyakarta: Kanisius.
- Thaib, Dahlan. (2017). *Teori dan Hukum Konstitusi*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Usfunan, Jimmy Z. (2021). *Ilmu Perundang-Undangan*. Depok: Rajawali Pers.
- Yani, Ahmad. (2023). *Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah di Indonesia*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.

SUMBER PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
- Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah

Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (UU HKPD)

Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 7 Tahun 2020 tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum

Peraturan Bupati Ciamis Nomor 36 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Perangkat Daerah

Peraturan Bupati Ciamis Nomor 55 Tahun 2022 tentang Petunjuk Implementasi Pelayanan Parkir Berlangganan di Tepi Jalan Umum

SUMBER LAINNYA

Aninda, M. K., & Suryaningsih, M. (2019). "*Implementasi Kebijakan Retribusi Parkir Tepi Jalan Umum Berdasarkan Perda No.2 Tahun 2012 Di Kelurahan Krobokan Kota Semarang Berdasarkan Model Van Meter dan Van Horn*". *Journal of Public Policy and Management Review*, 8(2). Diakses tanggal 20 Februari 2026. <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/jppmr/article/viewFile/24956/22241>

Hasibuan, Sjahbana A. (2019). "*Peranan Ekologi Pemerintahan Dalam Meningkatkan Daya Saing Kebijakan Pemerintah Daerah*". *Jurnal Kebijakan Pemerintahan*, 2(1). Diakses tanggal 30 Maret 2026, <https://garuda.kemdiktisaintek.go.id/documents/detail/1960485>